

**TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI BANTUL)**

Heredita Suci Maharani¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

INTISARI

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada pemenuhan hak restitusi dalam proses peradilan. Permasalahan utama yang dikaji adalah ketidakseragaman praktik pemberian hak restitusi kepada korban di pengadilan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi dan kendala pelaksanaannya serta mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan secara seragam dan optimal. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Bantul dan UPTD PPA Kab. Bantul, melalui studi pustaka, wawancara, dan analisis dokumen hukum secara deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan putusan, yakni Pengadilan Negeri Bantul menolak permohonan restitusi korban, sedangkan Pengadilan Negeri Banda Aceh mengabulkan permohonan tersebut, yang mencerminkan ketidakseragaman dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendampingan hukum bagi korban serta penyusunan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum agar pelaksanaan restitusi dapat dilakukan secara konsisten dan optimal di seluruh pengadilan.

Kata kunci: *Kekerasan dalam rumah tangga, korban, perlindungan hukum, restitusi.*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Acmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Acmad Yani Yogyakarta

***JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
DOMESTIC VIOLENCE (CASE STUDY OF BANTUL DISTRICT
COURT)***

Heredita Suci Maharani¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

ABSTRACT

This study examines legal protection for victims of domestic violence (DV), focusing on the fulfillment of the right to restitution in the judicial process. The main issue examined is the inconsistent practice of granting restitution to victims in court, which creates legal uncertainty. The study aimed to determine judges' considerations in granting restitution, the obstacles to its implementation, and to identify forms of legal protection that can be implemented uniformly and optimally. The method used was a normative-empirical approach, using case studies at the Bantul District Court and the Bantul Regency Women and Child Protection Unit (UPTD PPA). This study involved literature review, interviews, and descriptive-analytical analysis of legal documents. The results showed differences in decisions: the Bantul District Court rejected the victim's restitution request, while the Banda Aceh District Court granted the request, reflecting the lack of uniformity and legal uncertainty. This study emphasizes the need for increased outreach and legal assistance for victims, as well as the development of clear guidelines for law enforcement officials to ensure consistent and optimal implementation of restitution across all courts.

Keywords: Domestic violence, victims, legal protection, restitution.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta